

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A Z Abidin dan Andi Hamzah. 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone.
- Adami Chawazi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Adnan Paslyadga. 2009. *Penjelasan Pasal-Pasal Tertenty Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bappenas.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas, et al. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Yogyakarta: Rangka Education.
- Amiroeddin Sjarif. 1996. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andy Hamzah(I). 1991. *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2008. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bambang Sugeng Rukmono. 2024. *Superioritas Delik Korupsi Merugikan Keuangan Negara dalam Praktik Peradila*, Depok: Rajawali Pers.
- Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Darwan Prinst. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Edward Omar Sharif Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Pustaka Atma.
- Ermansjah Djaja. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Elwi Danil. 2014. *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hermien Hadiati Koeswadi. 1994. *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Aditya Bakti.
- _____. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Irwansyah. 2020. *Metode Penelitian Penelitian Hukum: Pilihan, Paradigma, dan Praktik*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- _____. 2021. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- J.E. Sahetapy. *Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Prof. Dr. Schaffmeister, Prof. Dr. Nico Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus*, Yogyakarta: Liberty.
- Leden Marpaung. 2009. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta: Djambatan Edisi Revisi

- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moch. Faisal Salam. 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Muhammad Hatta. 2019. *Kejahatan Luar Biasa Extra Ordinary Crime*, Lhokseumawe: Unimal Press.
- O.C Kaligis dan Associates. 2009. *Kumpulan Kasus Menarik Jilid 4*, Jakarta: O.C Kaligis dan Associates.
- P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. *Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- R. Deddy Harryanto. 2023. *Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas Perbuatan Korupsi oleh Pegawai Negeri dan/atau Pejabat Publik*, Hakim Adhoc Tipikor Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas IA.
- Ramelan. 2009. *Perluasan Ajaran Turut Serta Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Transnasional*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan Biro Hukum.
- Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Romli Atmasasmita. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Mandar Maju.
- S. R. Sianturi. 2013. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Perss.
- Suadarto. 1986. *Hukum dan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2013. *Strategi dan Teknik Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syed Husein Alatas. 1983. *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kotemporer*, Jakarta: LP3ES.
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta; RajaGrafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Yudi Kristiana. 2006. *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Yuhendrilus. 2021. *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pencurian Terhadap Anak di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN.Tlk)*, JUHANPERAK 2, No. 3.
- Yupiter Marpi. 2020. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Tasikmalaya: Zona Media Mandiri.

Jurnal:

- Addini Zahra Syahputri, et.al. 2023. *Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif, Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 2 Nomor 1 Edisi Juli 2023, Pematangsiantar: Diklinko Journals Publisher.
- Azis Akbar Ramadhan. 2025. Analisis Yurisdiksi Kewenangan Pengadilan Militer Mengadili Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan TNI, Journal Scientific of

- Mandalika: Volume 6. Nomor 9, Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Barlian Marpaung. 2022. *Memahami Pemenuhan Unsur Perbuatan Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Nalar Keadilan Volume 2 Nomor 2, Jakarta: Universitas Jakarta.
- Bisma Cahaya Raditya. 2019. *Upaya Pembuktian Oditur Militer dan Pertimbangan Hakim Memutus Tindak Pidana Desersi dalam Waktu Damai dengan Pemberatan*, Jurnal Verstek, Volume VII Nomor 1 Januari, Semarang: Fakultas Hukum UNS.
- Cantika Tresna Rahayu, Irwan Triadi. 2025. *Dualisme Peradilan Militer dan Peradilan Umum: Problematika dan Urgensi Reformasi*, Media Hukum Indonesia, Volume 3 Nomor 2 Edisi Juni 2025, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
- Edward Omar Sharif Hiariej. 2021. *Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak (Principle of Lex Specialist Systematic and Tax Criminal Law*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure: Volume 21. Nomor. 1, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Jan Muhammad Altair. 2017. *Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Militer Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer*, Jurnal Lex Privatum, Volume V Nomor 7 September, Manado: Fakultas Hukum Unsrat.
- Katrin Valencia Fardha. 2023. *Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana journal Of Social Science Research*, Volume 3 Nomor 5 Edisi Tahun 2023, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- M Rizky Fajar Ryansyah, et.al. 2025, *Kewenangan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Peradilan Militer Menurut Peraturan Perundang-Undangan*, Limbago: Journal of Constitutional Law Volume 5 Nomor 1 Edisi 2025, Muara Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi Mendalo.
- Mayjen TNI Supriyatna. 2014. *Pentingnya Hukum Disiplin Militer Ditinjau dari Aspek Pembinaan Prajurit TNI*, Volume 2, Nomor 1, Sekolah Tinggi Hukum Militer.
- Nurdhin Barorah dan Nike Rosdiyanti, 2019, *Status Pertanggung jawaban Pelaku Tindak Pidana Bagi Penderita Gangguan Mental Kategori Kepribadian Antisocial Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum, Volume 7 Nomor 2, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Puput W. A. 2021. *Keberadaan Ajaran Penyertaan sebagai Perluasan Delik dan Perluasan Pertanggungjawaban Pidana (Pasal dan 56 KUHP)*, Juristik Volume 02 Nomor 02 Edisi Agustus 2021, Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
- Ronald F C Sipayung. et al. *Analisis Yuridis Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*, Medan: USU Law Journal 4, no. 3 (2016).
- Syarif Saddam Rivanie, et.al. 2022. *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Halu Oleo Law Review, Volume 6 Nomor 2 Edisi September 2022, Kendari: Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo.

- Sisca Carolina Karubun. 2025. *Ketidaktepatan Peleburan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ke dalam Pasal 603 dan 604 KUHP*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 3 Nomor 4, Pasundan: Universitas Pasundan.
- Siswantari Pratiwi. 2022. *Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Binamulia Hukum Volume 11, Nomor 1, Juli 2022, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.
- Tomy Dwi Putra. 2013. *Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Disersi*, *Lex Crimen*: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2. Nomor 2, Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Vania Oktaviani Dewi dan Irwan Triadi. *Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Subjek Militer saat sedang Menduduki Jabatan Sipil*, Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol. 1, Nomor 4. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
- Verawaty. 2024. Analisis Hukum Terhadap Penerapan Hukum Tindak Pidana Pembantuan dalam Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan MA Nomor: 2166 K/Pid.Sus/2021, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 11. Nomor 1, Palembang: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda.

Skripsi:

- Devi Adelia Mutiah. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia*. Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- AM Naufal Maulana. 2021. *Analisis Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Alat Konstruksi Pembuatan Jalan (Studi Kasus Putusan Nomor: 94/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Mks)* Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 025/PUU-XIV/2016.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo UU. No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Kejaksaan Agung, Surat Edaran Jaksa Agung Pembuatan Surat Dakwaan, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993.

Sumber Internet:

Aryodamar. ICW: 8 Kasus Korupsi yang Libatkan Militer Rugikan Negara Rp24,76 T. [idntimes.com](https://www.idntimes.com/news/indonesia/icw-8-kasus-korupsi-yang-libatkan-militer-rugikan-negara-rp24-76) [cited 5 September 2025]. Available from: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/icw-8-kasus-korupsi-yang-libatkan-militer-rugikan-negara-rp24-76>.

Komisi Pemberantasan Korupsi: Kinerja KPK 2020-2024: Tangani 2.730 Perkara Korupsi, Lima Sektor Jadi Fokus Utama, [KPK.go.id](https://www.kpk.go.id). [cited 28 Agustus 2025]. Available from: <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024-tangani-2730-perkara-korupsi-lima-sektor-jadi-fokus-utama>.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung, Surat Dakwaan Kaitannya Dengan Perkembangan Kualitas Dan Kuantitas Kejahatan Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung, 2011), sebagaimana ditampilkan dalam https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=34, Kesimpulan No. 2.